

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan dari suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kepada kehidupan yang lebih baik, dimana pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat serta harkat dan martabat manusia yang meliputi peningkatan berbagai barang kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup serta perluasan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat (Todaro, 2004:103). Dalam hal ini tugas mempertinggi tingkat kesejahteraan bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga seluruh komponen masyarakat. Untuk itu pemerintah harus mampu mendorong dan memberdayakan seluruh komponen masyarakat, khususnya peran sektor swasta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, lebih adil dan lebih merata akan dapat dicapai dengan baik dan lebih cepat.

Tujuan dari Pembangunan Ekonomi adalah meningkatkan tersedianya serta memperluas distribusi kebutuhan dasar rakyat banyak, meningkatkan taraf hidup, antara lain pendapatan yang meningkat, kesempatan kerja yang cukup, pendidikan yang lebih baik, perhatian lebih besar kepada nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan (dalam arti kesejahteraan sosial, jasmani dan rohani),

memperluas pilihan-pilihan sosial ekonomi dari perorangan dan bangsa, dengan memberikan kebebasan dari ketergantungan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sedangkan Faktor non ekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, dan sistem yang berkembang dan berlaku.

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi, yang dalam prosesnya saling terkait dan saling berhubungan antara faktor-faktor yang menyeluruh dengan demikian dapat diketahui deretan peristiwa yang timbul dan yang akan mewujudkan peningkatan dalam kegiatan ekonomi serta taraf kesejahteraan masyarakat dari suatu tahap pembangunan ke tahap berikutnya.

Keberhasilan pembangunan sangat diupayakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam meminimalisir terjadinya permasalahan ekonomi seperti pengangguran dan ketimpangan. Jika pembangunan ekonomi berhasil diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat sehingga mengurangi permasalahan ekonomi. Indikator keberhasilan ekonomi tidak hanya dilihat melalui pendapatan perkapita akan tetapi juga melihat tingkat pertumbuhan pendapatan dalam harga konstan harus lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan penduduk. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat

dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari seluruh Kabupaten/Kota yang tidak terlepas dari usaha keras bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat namun di sisi lain berbagai kendala dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber modal masih dihadapi oleh penentu kebijakan di tingkat Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Pada dasarnya, PDRB merupakan jumlah output yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu regional atau Provinsi di suatu negara. Produk Domestik Regional Bruto dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa-jasa yang diproduksi didalam Negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Barang-barang dan jasa-jasa ini diproduksi bukan saja oleh perusahaan milik penduduk Negara tersebut tetapi oleh penduduk Negara lain yang bertempat tinggal di negara tersebut. (Sukirno, 2005:33)

PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena nilai PDRB ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga perubahan yang diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu:

1. Segi produksi , PDRB merupakan jumlah netto atas suatu barang dan jasa yang dihasilkan untuk unit-unit produksi dalam suatu wilayah dan lainnya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
2. Segi Pendapatan , PDRB merupakan jumlah balas jasa (pendapatan) yang diterima oleh faktor-faktor produksi karena ikut serta dalam proses produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
3. Segi pengeluaran, PDRB merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah dan lembaga swasta non profit, investasi serta ekspor netto biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Product Domestic Regional Bruto (PDRB) suatu daerah menggambarkan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Dengan melihat angka PDRB pada suatu daerah memberikan gambaran pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai. Pengukuran laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) total atau pun per sector, akan lebih baik jika menggunakan perhitungan dengan berdasarkan harga konstan. Karena dengan menggunakan harga konstan pengaruh naik atau turunnya tingkat harga setiap tahun atau tingkat inflasi dapat dihilangkan sehingga perhitungannya menjadi lebih riil

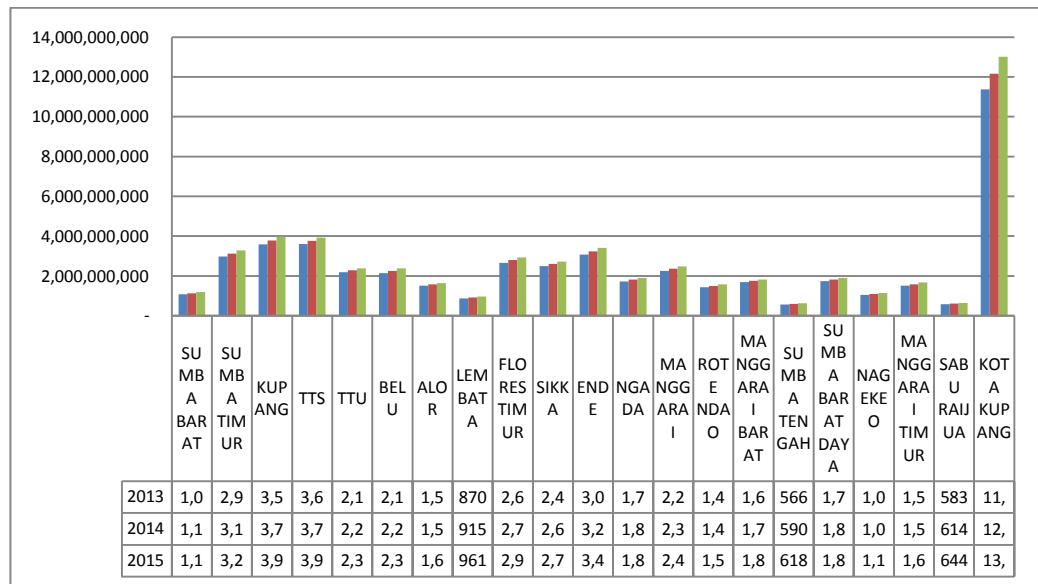
PDRB sendiri dibagi menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku adalah PDRB yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan merupakan PDRB yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung memakai harga pada tahun tertentu sebagai tahun

dasar (Statistik Indonesia 2013). Jadi dalam bahasa sederhananya PDRB adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu.

Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam masa tertentu adalah pendapatan domestik regional bruto (PDRB) tahun tertentu dikurangi pendapatan domestik bruto (PDRB) tahun sebelumnya dibagi pendapatan domestik bruto (PDRB) tahun sebelumnya dikali 100%. Perekonomian mengalami pertumbuhan apabila tingkat ekonomi lebih tinggi dari pada yang dicapai pada tahun sebelumnya. Pembangunan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara menyeluruh dan berkesinambungan dapat dikatakan telah meningkatkan perekonomian masyarakat, namun disisi lain kendala utama pemerintah dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya modal masih dihadapi oleh penentu kebijakan ditingkat daerah (Kabupaten/Kota) maupun Provinsi.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi NTT pada kurun waktu ini mengalami fluktuasi dan berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena sumber daya alam dan prasarana penunjang yang ada sangat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Gambaran PDRB menurutbharga konstan disetiap Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1.
PDRB menurut harga konstan Kabupaten/Kota
di Provinsi NTT Tahun 2013 - 2015 (dalam miliaran rupiah)



Sumber : BPS Provinsi NTT Tahun 2017

Gambar 1.1 diatas menunjukan bahwa PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2013-2015 selalu fluktuatif. Perbedaan yang terjadi di setiap Kabupaten/Kota disebabkan oleh ketersediaan sumber daya yang berbeda dan belum optimal mengolah potensi daerah yang ada untuk mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Walaupun hasil pembangunan sudah menunjukan suatu kemajuan , namun jika dilihat lebih lanjut yang sifatnya kualitatif (kualitas pertumbuhan), masih banyak persoalan yang timbul dan sampai sekarang belum dapat diselesaikan diantaranya, tingkat kemiskinan, meningkatnya pengangguran, pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat serta ketidakmerataan pembangunan antar wilayah atau kesenjangan antar wilayah.

Ada beberapa komponen yang dapat mempengaruhi PDRB dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diantaranya adalah belanja modal pemerintah, tenaga kerja dan investasi swasta. Belanja modal pemerintah secara umum dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang selanjutnya diharapkan akan mempertinggi intensitas ekonomi. Menurut (Halim 2004: 73) belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti belanja pemeliharaan dan kelompok belanja administrasi umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 menyebutkan bahwa belanja modal pemerintah adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) membagi belanja modal menjadi lima bagian yaitu:

1. Belanja modal tanah
2. Belanja jalan, irigasi dan jaringan
3. Belanja gedung dan bangunan
4. Belanja peralatan dan mesin
5. Belanja aset tetap lainnya

Belanja modal berperan dalam peningkatan kualitas layanan publik sekaligus menjadi stimulus dalam perekonomian. Belanja jalan, jaringan, peralatan dan mesin dapat mendorong kelancaran proses usaha sektor swasta guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain hal tersebut, pemerintah juga

mengalokasikan belanja peralatan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan serta pendidikan daerah. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

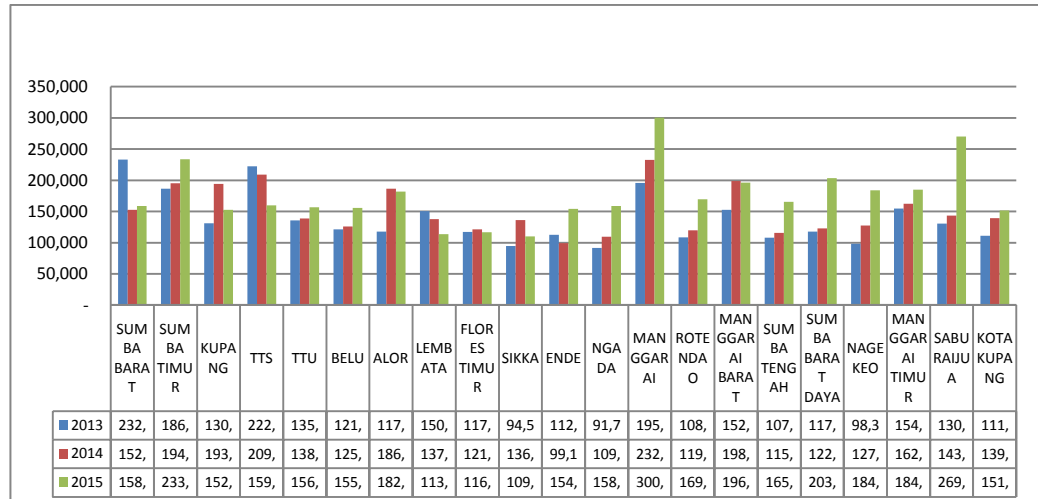
Pertumbuhan PDRB, sebagai tolok ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah (Wibisono, 2005:304). Pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 pasal 53 ayat 1, Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan set tetap lainnya. Pengelolaan APBD di berbagai daerah masih belum efektif ditunjukkan dengan alokasi belanja pegawai yang terus meningkat dibandingkan dengan alokasi belanja modal untuk

pembangunan daerah yang justru terus menurun. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan belanja modal untuk pembangunan rumah dinas, pengadaan mobil dinas dan pembelanjaan lain yang tidak tepat sasaran. Seharusnya belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatannya, hal ini akan bersinggungan langsung dengan pelayanan publik. Pada prinsipnya alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah atau masyarakat di daerah bersangkutan. Dalam mempercepat pembangunan di daerah disegala bidang agar terlaksana tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, pemerintah memerlukan modal besar akan tetapi kemampuan pemerintah dalam menyediakan modal untuk mempercepat pembangunan sangatlah terbatas.

Proporsi maupun perkembangan realisasi belanja publik yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanja aparatur daerah juga menunjukkan bahwa alokasi anggaran sebagian besar digunakan untuk kepentingan konsumtif. Keadaan ini menyebabkan realisasi belanja daerah yang besar belum mendorong tingkat PDRB dalam pertumbuhan ekonomi di NTT secara signifikan. Belanja modal di Provinsi NTT dapat digambarkan pada gambar 1.2. sebagai berikut :

Gambar 1.2.
Belanja modal di Provinsi NTT Tahun 2013-2015 (miliaran Rupiah)



Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi NTT, Tahun 2017

Gambar 1.2. diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 belanja modal terendah ada pada Kabupaten Ngada sebesar Rp.91.794.082.261 sedangkan tertinggi ada pada Kabupaten Sumba Barat sebesar Rp.232.900.978.994, pada Tahun 2014 belanja modal terbesar ada pada Kabupaten Manggarai sebesar Rp.232.817.403.497 dan terendah adalah Kabupaten Ende sebesar Rp.99.111.335.062 dan Tahun 2015 Belanja modal tertinggi ada pada Kabupaten Manggarai sebesar Rp. 300.130.363.623 dan terendah pada Kabupaten Sikka sebesar Rp. 109.886.664.636.

Menurut (Todaro 2000: 142) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan terkonsentrasinya jumlah penduduk di perkotaan sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi. Jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi

serta memiliki skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi/output disuatu daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan telah ditentukan bahwa batasan minimal usia seorang tenaga kerja di Indonesia adalah 10 tahun atau lebih. Namun indonesia tidak mengandung batasan maksimum usia seorang tenaga kerja. Hal ini terjadi karena Indonesia memiliki jaminan sosial nasional yang cukup kuat. Kesimpulannya bahwa tenaga kerja di Indonesia adalah penduduk yang telah berusia 15 tahun atau lebih yang ikut serta dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja yaitu 15-65 tahun. Penduduk dalam usia kerja ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (Suparmoko, 2002:151).

Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang terlibat atau masih berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Menurut(Suparmoko, 2002:25) angkatan kerja adalah penduduk yang belum bekerja namun siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Angkatan kerja terdiri atas golongan yang bekerja, golongan yang menganggur dan golongan yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih sekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan.

Menurut BPS penduduk berumur 10 tahun ke atas terbagi sebagai Angkatan Kerja (AK) dan bukan AK. Angkatan Kerja dikatakan bekerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara kontinu selama seminggu yang lalu. Sedangkan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan disebut menganggur. Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi di suatu daerah.

Salah satu faktor yang berperan dalam penyerapan tenaga kerja adalah tingkat upah. Upah mempunyai pengaruh terhadap kesempatan kerja. Semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan maka akan berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja nomor 13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha / pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi. Kebijakan upah diindonesia merujuk pada standar kelayakan hidup bagi para pekerja. Pengupahan diindonesia pada umumnya didasarkan pada tiga fungsi upah, yaitu :

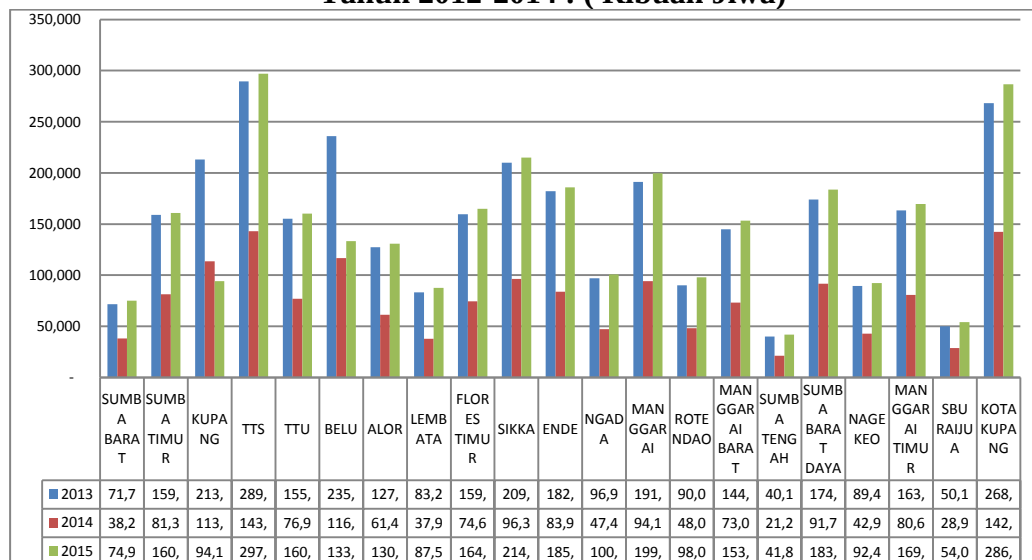
a) menjamin kehidupan yang layak bgi pekerja dan keluarganya,

b) mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, c) menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktifitas pekerja.

Menurut Sadono Sukirno (2005 : 351) upah adalah pembayaran atas jasa-jasa fisik yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Upah merupakan imbalan jasa yang diterima seseorang didalam hubungan kerja berupa uang atau barang melalui perjanjian kerja, imbalan jasa diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri dan keluarganya.

Sesuai amanat Peraturan perundang-undangan bidang pengupahan khususnya peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015, Gubernur wajib menetapkan dan mengumumkan UMP secara serentak setiap tanggal November. Data tenaga kerja di Provinsi NTT dapat dilihat pada Gambar 1.3. sebagai berikut :

Gambar 1.3.
Data Tenaga kerja di Provinsi NTT
Tahun 2012-2014 : (Ribuan Jiwa)



Sumber : BPS Provinsi NTT, Tahun 2017

Tabel 1.3. diatas menunjukan bahwa pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja terbanyak berada pada Kabupaten TTS yaitu 289.485 orang dan terendah pada Kabupaten Sumba Tengah yaitu 40.153 orang selanjutnya pada tahun 2014 jumlah tenaga kerja terbanyak ada pada Kabupaten TTS yaitu 143.146 orang dan terendah pada Kabupaten Sumba Tengah yaitu 21.217 dan pada tahun 2015 jumlah tenaga kerja terbanyak pada Kabupaten TTS yaitu 297.050 orang dan terendah pada Kabupaten Sumba Tengah yaitu 41.830 orang. Banyaknya pengangguran, kemiskinan dan keterbelakangan di Provinsi NTT diakibatkan karena Pertumbuhan Penduduk yang terlalu cepat dan tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada hal ini juga menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT.

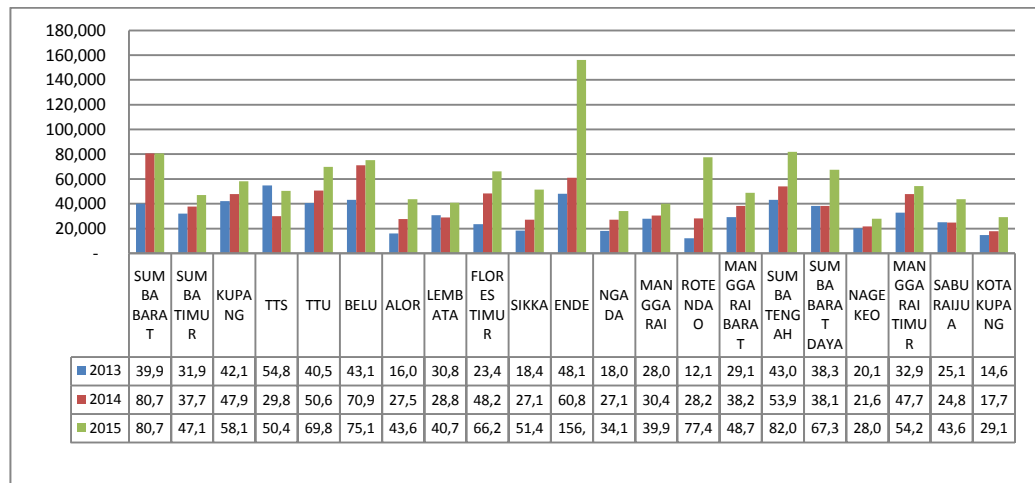
Salah satu aspek dalam kebijakan pemerintah perlu melakukan usaha-usaha agar memperoleh lebih banyak dana untuk pembangunan. Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Teori ekonomi mendefenisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang. Investasi sering mengarah pada perubahan dalam keseluruhan permintaan dan mempengaruhi siklus bisnis, selain itu investasi mengarah pada

akumulasi modal yang bisa meningkatkan output potensial negara dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Keberhasilan pertumbuhan, tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya investasi. Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat. Investasi adalah mobilisasi sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/pendapatan dimasa yang akan datang. Investasi swasta terdiri dari investasi yang dilakukan oleh pihak dalam negeri melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan pihak luar negeri melalui Penanaman Modal Asing (PMA). Kehadiran investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri ini diharapkan dapat menopang laju pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Deddy Rustioni (2008) menyimpulkan bahwa Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal dalam negeri, Angkatan Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan. Provinsi NTT dapat dilihat pada gambar 1.4 sebagai berikut :

Gambar 1.4.
Investasi di Provinsi NTT
Tahun 2013-2015 (miliaran Rupiah)



Sumber : BPS Provinsi NTT, Tahun 2017

Gambar 1.4. diatas menunjukan bahwa Investasi dalam hal ini penanaman modal dalam negeri pada Tahun 2013 tertinggi di Kabupaten TTS dan terendah di Kabupaten Rote Ndao, di tahun 2014 dapat dilihat bahwa investasi terbesar ada pada Kabupaten Sumba Barat sebesar Rp. 80.732.539.618 dan terendah pada Kabupaten Nagekeo sebesar Rp. 21.661.588.949 dan tahun 2015 investasi terbesar ada pada Kabupaten Ende sebesar Rp. 156.193.848.298 dan terendah ada pada Kabupaten Nagekeo sebesar Rp. 28.005.762.982.

Latif dan Soesatyo melakukan penelitian tentang pengaruh investasi, tenaga kerja, dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri menyimpulkan bahwa Investasi, Tenaga Kerja, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara Parsial maupun simultan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri sedangkan Yesika Resianna Barimbing dan Ni Luh Karmini melakukan penelitian dengan judul pengaruh PAD, tenaga kerja, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali

menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, tenaga kerja, dan Investasi secara serempak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Pendapatan Asli daerah dan tenaga kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Sedangkan investasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka, penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul : “Pengaruh Belanja Modal, Tenaga Kerja dan Investasi Terhadap PDRB Di Provinsi NTT.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana gambaran belanja modal, tenaga kerja, investasi dan PDRB di Provinsi NTT?
2. Apakah Belanja modal, tenaga kerja dan investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Provinsi NTT?
3. Apakah belanja modal, tenaga kerja dan Investasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Provinsi NTT?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui gambaran belanja modal, tenaga kerja, investasi, dan PDRB di Provinsi NTT
2. Untuk mengetahui belanja modal, tenaga kerja dan investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Provinsi NTT.
3. Untuk mengetahui belanja modal, tenaga kerja dan Investasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Provinsi NTT.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari, terkait dengan PDRB di Provinsi NTT.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini menjadi bahan informasi bagi Pemerintah Daerah Provinsi NTT untuk menyusun program peningkatan PDRB.

